ANALISIS EFEKTIVITAS MEKANISME PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Zahra Nur Alya Fariyanto[1], Eka Ananda Silfiani[2,] Eva Hany Fanida[3], Melda Fadiyah Hidayat[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Surabaya*
Email: 25040674370@mhs.unesa.ac.id[1], 25040674374@mhs.unesa.ac.id[2], evafanida@unesa.ac.id[3], meldahidayat@unesa.ac.id[4]

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) budgeting mechanism in the Surabaya City Government. The research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through documentation and literature studies from official government documents such as APBD reports, RKPD, KUA-PPAS, and other related sources. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman interactive analysis model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the APBD budgeting mechanism in Surabaya has generally been implemented in accordance with applicable regulations, starting from the planning stage, budgeting formulation, discussion, ratification, to the implementation of the budget. The use of an e-budgeting system also supports transparency and accountability in regional financial management. However, the effectiveness of the budgeting process is still influenced by several factors, including coordination between regional apparatus organizations, transparency in budget information, and the capacity of human resources in managing regional finances. Therefore, strengthening coordination, improving the quality of human resources, and increasing public access to budget information are necessary to improve the effectiveness of regional financial management and support regional development goals.

Keywords : *Analysis of Effectiveness, Budgeting Mechanism, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Surabaya City Government*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi literatur yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah seperti laporan APBD, RKPD, KUA-PPAS, serta sumber literatur lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penganggaran APBD di Kota Surabaya secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pembahasan, penetapan, hingga pelaksanaan anggaran. Pemanfaatan sistem e-budgeting juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, efektivitas proses penganggaran masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti koordinasi antar perangkat daerah, transparansi informasi anggaran, serta kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan akses informasi publik guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah**.**

Kata Kunci : *Analisis Efektivitas, Mekanisme Penganggaran, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Surabaya*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah, maka Pelaksanaan otonomi daerah di indonesia memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan pada masing masing wilayahnya dan kepentingan masyarakatnya masing masing. Hal ini telah diatur dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pemerintahah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 yang membahas tentang perimbangan keuangan antara keuangan pemerintah pusat (negara) dengan pemerintahan kabupaten/kota (daerah), hal tersebut memberikan pernyataan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional. Otonomi daerah memberikan kebebasan yang bertanggung jawab, dimana pemerintah pusat tetap memegang kontrol agar implementasinya masih dalam aturan kebijakan nasional.

Salah satu hal penting pelaksaan pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. APBD adalah salah satu dokumen penting yang menunjukan perencanaan, pembangunan daerah oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya APBD adalah salah satu alat vital untuk mendukung kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan umum. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah bekerja secara berintegrasi yang nyata sehingga APBN dapat dihasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntuntan masyarakat secara optimal.

Kota surabaya adalah salah satu kota metropolitan yang memiliki berbagai tantangan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD. Tantangan paling umum yang dihadapi oleh kota surabaya adalah penurunan efisiensi anggaran, yang dimana ini juga menjadi tantangan juga untuk pemerintah daerah untuk mengatasinya. Analisis terhadap efektivitas mekanisme penganggaran APBD menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan APBD, melalui analisis tersebut dapat diketahui apakah proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan angaran telah dilakukan secara efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji kinerja pengelolaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Alexandre, Taufik, dan Hidayat (2023) menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan konsep *value for money*. Selain itu, penelitian Oktavia dan Handayani (2025) juga menelaah kinerja pengelolaan APBD di Kota Surabaya dari aspek akuntansi keuangan daerah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kinerja keuangan daerah dan efisiensi anggaran secara umum. Kajian yang secara khusus membahas efektivitas mekanisme proses penganggaran APBD mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan masih relatif terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang dapat mengkaji mekanisme penganggaran tersebut secara lebih mendalam.

Selain itu, hasil analisis ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitaas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah apakah kinerja dan mekanisme APBD kota surabaya sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dan sejauh mana anggaran yang ditetapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah? Sehingga penelitian menjadi

penting untuk dilakukan guna untuk menjawab hal tersebut yang memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme penganggaran APBD di kota surabaya dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui pengumpulan data dan menguraikan masalah. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif merupakan definisi dari "suatu jenis penelitian yang dibuat untuk memberikan pemahaman atau deskripsi dengan jelas tentang fenomena yang sedang diteliti atau dianalisis" (Moleong, 2017). Pendekatan kualitatif dalam analisis ini bertujuan supaya bisa lebih memahami secara komperehensif mengenai mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surabaya serta mengalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam melaksanakan proses penganggaran.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentas yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penganggaran APBD. Data yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui observasi tidak langsung dengan melakukan pengamatan data-data yang sudah disediakan secara resmi oleh pemerintah kota Surabaya, yakni berupa dokumen APBD, RKPD, KUA-PPAS, dan laporan realisasi. Penelitian ini juga mengambil beberapa data melalui studi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi hukum, dan dari sumber lain yang berkaitan dengan topik dalam penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis data yang akan dilakukan terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penganggaran pada sektor publik adalah tahapan untuk menentukan besaran dana yang akan dialokasikan kepada berbagai program atau kegiatan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan representasi dari perumusan strategi dan perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Tahapan dalam penganggaran merupakan hal yang sangat penting karena jika ada anggaran yang tidak efisien dan tidak berfokus pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat yang penting untuk kebijakan fiskal pada level pemerintahan daerah sektor publik yang menggambarkan rencana pendapatan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun. Perencanaan dan penganggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan setiap tahun, aktivitas tersebut berisi kegiatan pemerintah daerah yang menyusun rencana program kerja. Prinsip utama dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah mengidentifikasi serta mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan aktivitas yang telah disepakati tanpa melampaui batas dari kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, perencanaan dan penggaran merupakan aspek yang penting dalam mencapai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (Ibrahim, 2014).

Mekanisme penganggaran APBD di Kota Surabaya dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Tahapan tersebut meliputi proses perencanaan, pembuatan, pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran.

Tahapan perencanaan dan penganggaran APBD

Pada fase perencanaan dan penganggaran APBD tentunya bersifat berkala, proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyusunan rencana pembangunan, rangkaian penyusunan APBD dibuat dengan jangka panjang, menengah dan pendek seperti berikut:
   a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode 20 tahun yang berisikan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan serta menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan.
   b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode 5 tahun yang berisikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih serta menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan penganggaran APBD.
   c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode 1 tahun yang menjadi peran pentimg dalam perencanaan dan penganggaran APBD. RKPD memberikan rincian mengenai arah kebijakan RPJMD dalam prioritas tahunan yang harus dilaksanakan dan diukur, kemudian dianggarkan dalam APBD.
2. Penyusunan KUA dan PPAS
   a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen perancangan anggaran daerah yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi dasar untuk periode 1 tahun. KUA disusun berlandaskan RKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD.
   b. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran daerah yang memuat detail pembagian anggaran untuk setiap program dalam KUA. Dokumen ini disusun untuk menetapkan batasan anggaran tertinggi (plafon) bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA dan APBD. Dokumen ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mencapai kesepakatan mengenai prioritas pembangunan dan alokasi anggaran.
   c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen yang sangat penting dalam perencanaan dan penganggaran APBD yang memuat rincian rencana pendapatan, belanja, program, kegiatan, dan pembiayaan SKPD selama periode 1 tahun.
   d. Pelaksanaan anggaran dengan mengimplementasikan anggaran harus dilaksanakan berdasarkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) karena dokumen ini dapat memastikan bahwa anggaran yang sudah disetujui bisa digunakan dengan benar dan sesuai serta bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pada pelaksanaan APBD ini mencakup pengelolaan anggaran pendapatan, pengeluaran, dan pembiyaan. Setelah enam bulan, pemerintah daerah akan menyusun laporan terkait realisasi APBD untuk semester pertama beserta proyeksi untuk enam bulan ke depan. Laporan ini harus diserahkan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran tersebut, untuk kemudian

akan dibahas bersama. Penyesuaian APBD ini berdasarkan perkembangan dan perubahan dari situasi yang dilakukan melalui diskusi antara DPRD dan pemerintah daerah guna menyusun perkiraan perubahan untuk APBD tahun anggaran yang relevan (Ramadhania, 2023).

e. Pengelolaan dan akuntabilitas adalah fondasi dalam mewujudkan tata kelola dalam keuangan daerah yang baik (good governance). Pengelolaan dapat mencatat dan mengelola semua pemasukan dan pengeluaran secara terstruktur, sementara itu akuntabilitas menjadi salah satu bentuk laporan resmi sebagai tanggung jawab kepada DPRD dan masyarakat publik atas pelaksanaan anggaran yang sudah disusun. Pada masa akuntabilitas yang ada pada akhir periode ditandai dengan membuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan kegiatan yang sudah terlaksana. Selanjutnya, laporan ini akan disampaikan kepada camat atau bupati/walikota dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini harus dilaksanakan paling lambat setelah akhir tahun anggaran berakhir. Dokumen ini mencakup laporan keuangan, laporan realisasi anggaran dan kegiatan serta daftar program yang sudah dilaksanakan (Purwodadi, 2021).

Efektivitas Mekanisme Penganggaran APBD

Efektivitas dari sistem penganggaran dapat dilihat dari beberapa indikator, termasuk ketepatan dalam perencanaan, kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan publik. Dari sisi tata kelola pemerintahan, efektivitas APBD sangat berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Keterbukaan mengenai semua informasi anggaran dapat memberikan kesempatan bagi masyrakat untuk bisa memahami arah kebijakan fiskal daerah serta mengawasi pelaksanaannya. Namun, saat APBD lebih banyak digunakan untuk pengeluaran secara rutin dan menyelesaikan utang masa lalu, maka manfaat yang didapat secara langsung dari APBD untuk masyarakat menjadi kurang terlihat. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi pandangan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. APBD yang tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga dapat berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, efektivitas APBD memiliki imlikasi sosial dan politik yang luas, tidak hanya berfokus pada sisi teknis pengelolaan keuangan saja (Malinda, Lampang, Abshar, & Ramadhan, 2024).

Dari hasil analisis melalui sumber data dan studi literatur menujukkan bahwa mekanisme penganggaran APBD di Pemerintah Kota Surabaya pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur/aturan yang sudah ditetapkan. Tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran dilaksanakan melalui kerja sama antara berbagai instansi daerah serta melibatkan DPRD dalam proses pembahasan anggaran. Pemerintah Kota Surabaya juga telah menyediakan website yang berisikan informasi mengenai tahapan dalam penganggaran APBD di Kota Surabaya yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, Kota Surabaya juga telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan sistem e-budgeting yang dapat mengelola anggaran supaya lebih terbuka dan dapat memimalisir adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Berikut adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi efektivitas penganggaran APBD:

1. Koordinasi antar perangkat daerah harus terlaksana dengan baik dan komunikasi yang jelas. Kualitas penganggaran APBD sangat dipengaruhi oleh kerja sama yang baik dan terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Transparansi dan akuntabilitas juga memiliki peran penting dengan menyediakan akses informasi yang jelas dan mudah dalam proses penganggaran dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Kapasitas sumber daya manusia juga sangat diperlukan karena kemampuan para aparatur pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam mengelola anggaran. Aparat pemerintah daerah yang berkompeten dalam bidang ini akan mampu menyusun anggaran secara terperinci, efektif, dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian ini yang membahas tentang efektivitas mekanisme penganggaran APBD di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penganggaran telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tahapan tersebut mencakup beberapa yang mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Kbijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dilaksanakan oleh instansi daerah, hingga pembahasan dan penetapan APBD bersama DPRD. Secara umum, mekanisme penganggaran APBD di Kota Surabaya melalui hasil analisis dapat dikatakan cukup efektif karena telh melibatkan berbagai pihak dalam prsoses penyusunanannya, Selain itu, dibantu dengan adanya penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi, masih ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam mencapai efektivitas mekanisme anggaran, seperti keterbatasan waktu dalam proses pembahasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran yang ada di beberapa instansi daerah, serta kurang kuatnya transparansi dan akuntabilitas mengenai APBD itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Alexandre, J. F. X., Taufik, M., & Hidayat, H. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2021. Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi, 1(4), 201-218.

Arisman, A. F., Nafisah, N. A., Putri, M. R. A., Zuhri, M. L., Dewi, G. C. M., & Akbar, F. S. (2024). Analisis Penyusunan Anggaran Organisasi Pemerintah di Kelurahan Kendangsari Kota Surabaya. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1(5), 36-45.

Gazali, M. I., Ikbal, I., Pattiasina, V., Agustina, I., & Eljawati, E. (2025). ANALISIS PERENCANAAN PENGANGGARAN APBD PEMERINTAH. JURNAL LENTERA BISNIS, 14(2), 2364-2376.

Ibrahim, I. (2014). Perencanaan penganggaran daerah. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 15(01).

Malinda, O., Lampang, M. A., Ramadhan, M. A. N., Pratama, P., Octaviani, T., & Andrenossa, G. (2024). Mengungkap Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah. Economics Professional in Action (E-Profit), 6(2), 209-219.

Muttaqin, M. F. (2025, July). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2015-2023. In Seminar Nasional Manajemen (Vol. 10, No. 1).

Oktavia, T. R., & Handayani, N. (2025). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 14(5).

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA. (n.d.). Retrieved from Desa Purwodadi Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan

Taufiq, T. H. (2022). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Majalah Ekonomi, 27(1), 52-62.

Trianto, A. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 12(1).

Werimon, S. (2005). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)(Study Empiris Di Provinsi Papua) (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Yuliayah, P. L. R., & Ardini, L. (2022). Analisis Kinerja Pelaksanaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2016-2020. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 10(2), 118-128.